



PENGARUH RASIO KEMANDIRIAN, RASIO DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL, DAN RASIO EFEKTIVITAS TERHADAP APBD KABUPATEN KERINCI TAHUN 2010-2018

Dewi Ernita, Osi Hayuni Putri

Dosen STIE Sakti Alam Kerinci

(Naskah diterima: 1 September 2021, disetujui: 29 Oktober 2021)

Abstract

The study aims to determine: 1.) To see the effect of the ratio independence, the ratio of the degree of fiscal decentralization, and the ratio of effectiveness to APBD Kerinci district 2010-2018 both partially and simultaneously. 2.) To see how much the effect of the ratio independence, the ratio of the degree of fiscal decentralization, and the ratio of effectiveness to APBD Kerinci district 2010-2018 both partially and simultaneously. Based on research results and data processing result show that: 1.) The independence ratio does not significantly influence the APBD Kerinci district and influential simultaneously, while the degree of fiscal decentralization rate and effectiveness ratio have a negative and insignificant effectiveness to APBD Kerinci district and influential simultaneously. 2.) The magnitude the effect of the ratio independence, the ratio of the degree of fiscal decentralization, and the ratio of effectiveness to APBD Kerinci district 2010-2018 is 81% and the rest are influenced by other factors not explained in this study.

Keywords: *Independence Ratio, Degree of Fiscal Decentralization, Effectiveness Ratio, and APBD (Shopping Area).*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1.) Untuk melihat pengaruh independensi rasio, rasio derajat desentralisasi fiskal, dan rasio efektivitas terhadap APBD Kabupaten Kerinci 2010-2018 baik secara parsial maupun simultan. 2.) Untuk melihat seberapa besar pengaruh independensi rasio, rasio derajat desentralisasi fiskal, dan rasio efektivitas terhadap APBD Kabupaten Kerinci 2010-2018 baik secara parsial maupun simultan. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa: 1.) Rasio kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap APBD Kabupaten Kerinci dan berpengaruh secara simultan, sedangkan tingkat desentralisasi fiskal dan rasio efektivitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap APBD Kabupaten Kerinci dan berpengaruh secara simultan. 2.) Besarnya pengaruh independensi rasio, rasio derajat desentralisasi fiskal, dan rasio efektivitas terhadap APBD Kabupaten Kerinci 2010-2018 adalah sebesar 81% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Rasio Kemandirian, Derajat Desentralisasi Fiskal, Efektivitas. Rasio, dan APBD (Area Perbelanjaan).

I. PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan suatu perwujudan pelaksanaan desentralisasi dan merupakan penerapan konsep teori *areal division of power* yang membagi kekuasaan secara vertikal, yaitu daerah dibawahnya. Konsep desentralisasi atau otonomi daerah merupakan konsekuensi dari bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana konsep tersebut merupakan sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang akomodatif terhadap inisiatif dan tanggung jawab masyarakat daerah. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pengertian otonomi daerah adalah wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi

daerah. Kebijakan desentralisasi yang diwujudkan dalam pembentukan daerah otonom dan penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut, Keuangan Daerah adalah “semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

II. KAJIAN TEORI

Menurut Halim (2004:150-158) indikator kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijadikan evaluasi dan sebagai pembanding skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Pengukuran

kinerja disini menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, dan rasio efektivitas.

RASIO KEMANDIRIAN

Menurut Halim (2007:5) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (pendapatan transfer) antara lain: Bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman.

RASIO DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL

Menurut Mahmudi (2010:49)), derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

RASIO EFEKTIVITAS

Menurut Mahmudi (2010:143) Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya.

APBD

Menurut Mahsun (2011:81) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun, mulai dari Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pasal 1 Ayat 1, Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

III. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Penelitian yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku atau literature, jurnal, hasil-hasil penelitian (skripsi, tesis) dan sumber-sumber lain (*webstie*) yang dipublikasikan dan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. APBD (Y)

Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah Kabupaten Kerinci dan pengeluaran atau belanja daerah Kabupaten Kerinci selama satu tahun dalam bentuk satuan rupiah. Dilihat dari Belanja Daerah.

2. Rasio Kemandirian (X^1)

asio Kemandirian Keuangan Daerah adalah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci dibandingkan dengan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci yang berasal dari sumber lain (pendapatan transfer) dalam bentuk satuan persen.

3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (X^2)

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total

penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah Kabupaten Kerinci. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah Kabupaten Kerinci dalam bentuk satuan persen

4. Rasio Efektifitas (X^3)

Rasio Efektivitas adalah menggambarkan kemampuan yang dicapai pemerintah daerah Kabupaten Kerinci dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah Kabupaten Kerinci dalam bentuk satuan persen.

Teknik Analisis Data

Analisis dan hipotesis dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Metode analisis data pada pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh dan melihat pengaruh secara parsial dan silmultan.

1. APBD (Belanja Daerah)

Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah Kabupaten Kerinci dan pengeluaran/ belanja daerah selama satu tahun dalam bentuk satuan rupia Dilihat dari Belanja Daerah.

2. Persamaan Regresi Linear Berganda

$$Y = 12,662 + 0,980 X_1 - 0,021 X_2 - 0,793 X_3 \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

Y merupakan APBD (Belanja Daerah), X_1 merupakan Rasio Kemandirian, X_2 merupakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, dan X_3 merupakan Rasio Efektivitas. A merupakan konstanta, dan e merupakan error.

IV. HASIL PENELITIAN**Tabel 1 Uji Regresi Linear Berganda**

Desentralisasi Fiskal adalah negatif yaitu (0,021). Hal ini menyatakan bahwa jika Rasio Derajat dapat diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 12,662 + 0,980 X_1 - 0,021 X_2 - 0,793 X_3$$

Persamaan tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut:

- a. Konstanta positif sebesar 12,662 artinya apabila Rasio Kemandirian, Desentralisasi Fiskal meningkat sebesar 1% maka APBD Kabupaten Kerinci tahun 2010-2018 akan menurun sebesar (-0,021).
- b. Koefisien Rasio Efektivitas adalah negatif yaitu (-0,793). Hal ini menyatakan bahwa jika Rasio Efektivitas meningkat sebesar 1% maka APBD akan menurun sebesar (0,793).

3. Uji t (Secara Parsial) Untuk menguji atau

mengetahui apakah ada atau tidaknya

Pengaruh Rasio Kemandirian, Rasio Derajat

Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Efektivitas

secara parsial terhadap APBD Kabupaten

Kerinci Tahun 2010-2018 maka digunakan

alat Uji t maka dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel 2 Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil output SPSS versi 23 di atas dapat dijelaskan $dk = (n - k) = 9 - 4 = 5$ dengan $dk (\alpha/5\%) = 0,05$ adalah 2,570, dan dibandingkan dengan hasil dari Thitung maka dapat didapatkan hasil:

1. Rasio Kemandirian memiliki nilai sig 0,449. Nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau $0,449 > 0,05$ dan Variabel Rasio Kemandirian mempunyai Thitung 0,822 dengan ttabel yaitu 2,570. Jadi Thitung < Ttabel ($0,822 < 2,570$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara Variabel independen Rasio Kemandirian terhadap variabel dependen (APBD) di Kabupaten Kerinci tahun 2010-2018.
2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal memiliki nilai sig 0,990. Nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau $0,990 > 0,05$ dan Variabel Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

mempunyai T_{hitung} -0,013 dengan t_{tabel} yaitu -2,570. Jadi $-T_{hitung} > -T_{tabel}$ ($-0,013 > -2,570$) maka H_a diterima dan H_o ditolak artinya terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara Variabel independen Rasio Efektivitas terhadap variabel dependen (APBD) di Kabupaten Kerinci tahun 2010-2018.

4. Uji F (Secara Simultan)

Untuk menguji atau mengetahui apakah ada atau tidaknya Pengaruh Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, dan Rasio Efektivitas secara Simultan terhadap APBD Kabupaten Kerinci Tahun 2010-2018 maka digunakan alat uji F, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Hasil Perhitungan Uji F ANOVA^a

Berdasarkan Tabel 4 dari uji ANOVA diatas didapat bahwa F_{hitung} adalah 7,099 dan F_{tabel} adalah 3,48, sehingga nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($7,099 > 3,48$) serta dengan nilai signifikan $0,030 < 0,05$. Maka H_a diterima

signifikan antara Variabel independen Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap variabel dependen (APBD) di Kabupaten Kerinci tahun 2010-2018

dan H_o ditolak yaitu Rasio Kemandirian (X_1), Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (X_2), dan Rasio Efektivitas (X_3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap APBD Kabupaten Kerinci Tahun 2010-2018.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Rasio Kemandirian

Terhadap APBD (Belanja Daerah)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilihat dari tabel 4.11 dengan hasil didapatkan bahwa Rasio Kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap APBD Kabupaten Kerinci 2010-2018, ini dibuktikan dengan $T_{hitung} < T_{tabel}$ ($0,822 < 2,570$) maka H_o diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti menggambarkan ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer.

Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah Kabupaten Kerinci terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat

terhadap pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi sebagai pedoman dalam melihat tingkat kemampuan daerah (dari sisi keuangan).

Hal ini relevan dengan hasil penelitian Didi Rahmat Hidayat 2015, menjelaskan bahwa Jika dianalisis secara parsial, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, rasio efesiensi keuangan daerah, dan rasio pertumbuhan terhadap kinerja keuangan daerah tidak berpengaruh

Hasil penelitian ini tidak mempunyai pengaruh Rasio Kemandirian terhadap APBD Kabupaten Kerinci tahun 2010-2018, Karena semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten Kerinci mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah dan begitu pula sebaliknya.

2. Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap APBD (Belanja Daerah)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dilihat dari tabel 4.11 dengan hasil didapatkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap APBD Kabupaten Kerinci 2010-2018, ini dibuktikan dengan $-T_{hitung} > -T_{tabel}$ ($-0,013 > -2,570$) maka H_a diterima dan H_o ditolak.

Hal ini sejalan dengan teori Mahmudi (2010:49) Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Vella Kurniasih Fitri 2013, menunjukkan hanya variabel Pendapatan Asli Daerah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal sedangkan 4 variabel lainnya yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio efesiensi keuangan daerah, dan dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Hasil penelitian ini mempunyai pengaruh negatif Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap APBD Kabupaten Kerinci tahun 2010-2018, karena tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan sangat kurang.

3. Pengaruh Rasio efektivitas

Terhadap APBD (Belanja Daerah)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dilihat dari tabel 4.11 dengan hasil didapatkan bahwa Rasio Efektivitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap APBD Kabupaten Kerinci 2010-2018, ini dibuktikan dengan $T_{hitung} > -T_{tabel}$ ($-1.901 > -2,570$) maka H_a diterima dan H_o ditolak.

Hal ini sejalan dengan teori Mahmudi (2010:143) Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian terdahulu oleh Novianto Indratno (2016), dengan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio efisiensi berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, sedangkan rasio efektivitas dan rasio ketergantungan daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Hal ini juga tidak sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Muhammad Zulkarnain (2019). Dengan Hasil penelitian diketahui bahwa pengaruh langsung kemandirian keuangan daerah dan rasio efektivitas bernilai positif terhadap belanja modal dan demikian pada variabel rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini mempunyai pengaruh negatif Rasio Efektivitas Terhadap APBD Kabupaten Kerinci 2010-2018, karena pengelolaan keuangan daerah yang tidak efektif.

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengaruh rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, dan rasio efektivitas terhadap APBD Kabupaten Kerinci Tahun 2010-2018 dengan menggunakan sampel 9 tahun maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Secara parsial variabel Rasio Kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap APBD Kabupaten Kerinci, ini dibuktikan dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,980 < 2,570$) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap APBD Kabupaten Kerinci, hal ini dibuktikan dengan $-T_{hitung} > -T_{tabel}$ ($-0,021 > -2,570$). Sedangkan Rasio Efektivitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap APBD Kabupaten Kerinci, hal ini dibuktikan dengan $-T_{hitung} > -T_{tabel}$ ($-1,901 > -2,570$). Secara simultan variabel rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, dan rasio efektivitas berpengaruh signifikan terhadap APBD Kabupaten Kerinci tahun 2010-2018 hal ini dibuktikan dari nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $7,099 > 3,48$.

2. Besar pengaruhnya Rasio Kemandirian (X1), Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (X2), dan Rasio Efektivitas (X3) Terhadap APBD secara simultan adalah 81% terhadap APBD, sedangkan 19% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Sedangkan diketahui bahwa Rasio Kemandirian yang mempunyai besar pengaruh yaitu sebesar 28,01%. Setelah itu variabel Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal yang mempunyai besar pengaruh yaitu sebesar -0,10%. Sedangkan variabel yang mempunyai pengaruh terbesar berasal dari variabel Rasio Efektivitas yaitu sebesar 52,96%. Dan jika ditambahkan hasil tersebut sama dengan Koefisien Determinasi Simultan 81%.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), 2019. *Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010-2018*, Kabupaten Kerinci: Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
- Didi Rahmat Hidayat, 2015. *Pengaruh Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Terhadap Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2009-2014*. Jurnal Buana Ilmu 2015.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Keuangan Daerah*. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- _____. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah: Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah—Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta
- Halim, Abdul & Muhammad Syamkusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah – Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.